

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian yang terjadi saat ini mengacu pada perekonomian terbuka, dimana dalam kondisi ini setiap negara melakukan perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kemajuan ekonomi negara-negara di dunia. Hal ini juga tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah negara Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk itu Indonesia bergabung dengan WTO (*World Trade Organization*). Namun, produk impor sedemikian membanjiri pasar Indonesia sehingga sulit untuk melindungi produk-produk dalam negeri. Fenomena ini adalah dampak liberalisasi perdagangan barang dengan penurunan tarif besar-besaran oleh *Free Trade Agreement* (FTA). Di samping masuknya barang impor secara besar-besaran, negara juga telah kehilangan pendapatannya dari tarif bea masuk barang. Liberalisasi impor membuat Indonesia tidak bisa tumbuh menjadi negara industri, dan semata-mata menjadi pasar hasil industri negara lain. Kesenjangan pertumbuhan ekonomi antara negara-negara maju dan berkembang ini menjadi pembicaraan berbagai forum internasional yang merupakan konfrontasi antara negara-negara tersebut. Terdapat semacam kecurigaan terhadap para pemimpin negara berkembang bahwa situasi dunia yang tidak menguntungkan akan

dilestarikan oleh negara-negara maju. Terdapat ketidakpuasan umum terhadap sistem perekonomian dunia yang sangat merugikan negara berkembang (Hata, 2006 : 30).

Fenomena gejala ekonomi dunia mempengaruhi stabilitas ekonomi global di beberapa kawasan dunia termasuk Indonesia sebagai negara berkembang. Dibalik melemahnya ekonomi dunia, perekonomian Amerika Serikat (AS) malah semakin perkasa. Data terakhir pada bulan Februari 2015 yang dilansir oleh Bank Indonesia, Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,36%. BI optimis bahwa inflasi akan mencapai targetnya yaitu dibawah 4% pada tahun 2015 ini (bi.go.id). Namun dibalik itu, nilai tukar rupiah tercatat anjlok dan bergerak mendekati level terendahnya dalam 17 tahun terakhir dengan menembus level 13.000 per *dolar AS*. Data valuta asing *Bloomberg*, Kamis (26/3/2015) menunjukkan nilai tukar rupiah tercatat melemah 0,24 persen ke level 13.015 per *dolar AS*. Rupiah sebenarnya dibuka di level 12.984 per *dolar AS*. namun kemudian terus tertekan. Kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia juga menunjukkan nilai tukar rupiah melemah ke level 13.003 per dolar AS. Rupiah turun dari level 12.932 per dolar AS pada perdagangan sebelumnya. Senior *Economist Global Research Standard Chartered*, Eric Alexander Sugandi menjelaskan, fluktuasi rupiah saat ini masih tinggi karena pengaruh dari luar. Tarik ulur perkiraan Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga menjadi faktor utama yang menggerakkan kurs dolar AS yang berakibat juga terhadap rupiah (Liputan6.com).

Terimbas global, di pos bea masuk realisasi penerimaan hanya Rp 4,7 triliun, dari targetnya yaitu Rp 6,2 triliun. Ini merupakan imbas lesunya ekonomi global, sehingga memperlambat aktivitas impor. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik

(BPS), impor Januari 2015 turun hingga 15,59% menjadi US\$ 12,59 miliar dibanding periode tahun lalu (www.pemeriksaanpajak.com).

Pengertian dari bea masuk itu sendiri adalah pungutan negara atas barang impor yang tujuan utamanya adalah untuk membatasi masuknya barang impor dalam rangka perlindungan produk dalam negeri. Bea masuk dikenakan apabila suatu negara memiliki produk sejenis yang dibuat di dalam negeri dimana produk tersebut perlu perlindungan dalam waktu tertentu hingga dapat bersaing secara bebas dengan produk yang berasal dari luar negeri. Meskipun saat ini kecenderungan tarif bea masuk untuk impor semakin menurun seiring dengan berlakunya *Free Trade Agreement* (FTA), namun untuk barang-barang tertentu khususnya produk pertanian, *World Trade Organization* (WTO) masih memberikan ruang untuk proteksi oleh negara-negara yang menghasilkan produk tersebut. Di samping ingin melindungi produk dalam negeri melalui bea masuk impor, Indonesia juga ini memaksimalkan penerimaan atas bea masuk tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) fungsi dari bea masuk itu sendiri adalah melindungi industri tertentu dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri dan memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan negara (www.beacukai.go.id). Bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, bea masuk masih menjadi salah satu tumpuan untuk mengisi pundi-pundi kas negara untuk menjalankan roda pemerintahan. Bea masuk merupakan salah satu jenis pajak perdagangan internasional yang masih menjadi unsur penting dalam unsur penerimaan negara. Tercatat bea masuk yang berhasil dihimpun tahun 2013 adalah sebesar 31,6 trilyun rupiah atau sekitar 2% dari total APBN (www.bppk.depkeu.go.id).

Peneliti sebelumnya, Salawati (2008) melalui penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan PPN pada Kanwil DJP Jakarta Selatan” menunjukkan bahwa inflasi dan nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan sumber penerimaan pajak terbesar kedua bagi negara Indonesia, sehingga perlu diawasi indikator apa saja yang dapat mempengaruhinya. Hal ini dikarenakan inflasi sangat berpengaruh terhadap daya konsumsi masyarakat, dimana daya konsumsi masyarakat tersebut sangat berpengaruh terhadap penerimaan PPN, karena semakin tinggi daya konsumsi masyarakat maka akan semakin tinggi pula tingkat penerimaan PPN.

Dari latar belakang inilah, maka penulis mengangkat isu tersebut sebagai topik skripsi. Perbedaannya dengan peneliti sebelumnya adalah variabel dependen yang digunakan adalah penerimaan atas bea masuk. Penelitian akan dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang berada di Kota Bandung, Jawa Barat. Dengan demikian, dapat diperoleh topik skripsi yang berjudul “Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan atas Bea Masuk (Impor) pada Kanwil DJBC Jawa Barat”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah inflasi dan nilai tukar rupiah mempunyai pengaruh secara parsial terhadap penerimaan atas bea masuk (impor)?
2. Apakah inflasi dan nilai tukar rupiah mempunyai pengaruh secara simultan terhadap penerimaan atas bea masuk (impor)?
3. Seberapa besar pengaruh inflasi dan nilai tukar rupiah secara parsial terhadap penerimaan atas bea masuk (impor)?
4. Seberapa besar pengaruh inflasi dan nilai tukar rupiah secara parsial terhadap penerimaan atas bea masuk (impor)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah inflasi dan nilai tukar rupiah secara parsial dapat mempengaruhi penerimaan atas bea masuk (impor).
2. Untuk mengetahui apakah inflasi dan nilai tukar rupiah secara simultan dapat mempengaruhi penerimaan atas bea masuk (impor).
3. Untuk mengetahui seberapa besar inflasi dan nilai tukar rupiah secara parsial mempengaruhi penerimaan atas bea masuk (impor).
4. Untuk mengetahui seberapa besar inflasi dan nilai tukar rupiah secara simultan mempengaruhi penerimaan atas bea masuk (impor).

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka dapat dirumuskan kegunaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi instansi terkait dalam rangka menghadapi inflasi dan nilai tukar rupiah sebagai indikator yang dapat mempengaruhi penerimaan negara.

2. Bagi Akademisi

Memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas mengenai inflasi dan nilai tukar rupiah serta pengaruhnya bagi perekonomian negara.

3. Bagi Peneliti

Memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman dalam bidang perekonomian Indonesia serta indikator-indikator yang mempengaruhinya.